

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2014 maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk lintas antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi utara, dipandang perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penyeberangan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tantang Pelayaran;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 39/AP.204/DRJD/2013 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan

- Pengumuman Presiden Republik Indonesia Tanggal 17 November 2014 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi;
- 2. Hasil pertemuan dengan pihak Operator Kapal terkait pada tanggal 18 November 2014 untuk membahas Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

 Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan dan alat-alat berat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

(2) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :

Golongan I : Sepeda;

Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan

gerobak dorong;

Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan

kendaraan roda 3;

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai

5 (lima) meter dan sejenisnya.

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Bus, Mobil barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan

7 (tujuh) meter dan sejenisnya;

Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya,

dan kereta penarik tanpa gandengan;

Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter

dan sejenisnya;

Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil

Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan

16 (enam belas) meter dan

sejenisnya;

Golongan IX

Kendaraan bermotor berupa Mobil tronton)/tangki, (truk Barang kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan lebih dari panjang ukuran dan belas) meter (enam 16 sejenisnya.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar (Golongan VII, VIII dan IX), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dimaksud Pasal 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Premi Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut (TJP) dari PT. Jasa Raharja Putera.

Pasal 6

Kepada pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara.

Pasal 7

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 26 | November 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
- 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Sulawesi Utara;
- 5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara;
- 6. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara;
- 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 9. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Utara;
- 10. Dirut PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
- 11. Dirut PT. (Persero) AK Jasa Rahardja;
- 12. Dirut PD. Pelayaran Sitaro di Ondong;
- 13. Direktur PD. Angkutan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
- 14. Ketua DPP GAPASDAF di Jakarta.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 58 TA HUN 2014
TANGAL : 26 NOVEMBER 2014
TENTANG : PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI
LINTAS ANTAR KABUPATENIKOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

		(PER ORANG RUPIAH)	PANG						(PER UNIT RUPIAH)	RUPIAH)					
LINTASAN	TARIF (Rp)	DEIMAGA	ANAK	NAGNO	GOLONGAN	GOLONGAN	GOLONGAN GOLONGAN IV	GOLONGAN IV	GOLONGAN V	GOLONGAN	GOLONGAN VI	GOLONGAN VI GOLONGAN	GOLONGAN	GOLONGAN	GOLONGAN
2		DEWASA	YANA	GOLONGAN	=	=	PENUMPANG	BARANG	PENUMPANG	V BARANG	PENUMPANG	BARANG	IIA	NIII N	×
	Biaya Pokok	133,870	87,010	201,749	353,061	706,121	2,206,630	1,941,834	3,026,235	2,900,142	5,295,911	5,169,818	6,178,563	9,583,077	15,501,542
MELONGUANE	Asuransi	5,000	2,000	3,090	3,700	7,410	23,190	13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110
1	Jumian	136,800	22,000	7	336,700		6,1	1,555,500	2,003,300	4,040,000	0,000,000	3,400,000		9,031,300	0,000,000
AMUKANG-	Biaya Pokok	5,000	5,000	30,000	3,700	7.410	1,292,730	1,137,608	1,77,895	24,900	3,102,566	36,555	3,019,000	54,195	9,225,122
	Jumlah	72,300	48,600	7	7	4	1,	1,1	1,829,700	1,723,900	3,202,900	3,065,200	3,6	5,668,300	9,291,900
	Biava Pokok	92,840	60,280		243,697	.4	1,523,103	1,340,331	2,088,827	2,001,793	3,655,448	3,568,413	4,264,689	6,614,620	14,051,794
BI ONG-PETA	Asuransi	5,000	5,000		3,700	7,410	23,190	13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110
	Jumlah	97,800	65,200		247,300	494,800	1,546,200	1,354,000	2,145,900	2,027,000	3,756,100	3,605,200		6,669,100	14,118,900
BITUNG-	Biava Pokok	51,600	37,200	88,575	155,006	310,011	968,785	846,994	1,295,957	1,273,260	2,325,083	2,269,724	2,740,276	4,207,293	7,850,705
	Jumlah	26,600	42,200		158,700	317,400	991,600	860,300	1,352,700	1,298,100	2,425,400	2,306,200	7,	4,261,400	7,917,500
NG	Biava Pokok	102,000	68,400	158,962	275,534	593,459	+	1,536,634	2,437,420	2,331,445	4,238,991	4,238,991	4,980,814	7,926,913	14,526,090
(205 MILE)	Asuransi	107.000	73,400		279,200	600,900		1,550,300	2,494,500	2,356,600	4,339,700	4,275,800	5,023,900	7,981,400	14,593,200
LIKUPANG-	Biava Pokok	40.105	26.068	64.169	112,295	224,590	701.844	661.739	962,529	922,424	1.684.426	1.644,321	1,985,216	3.048,009	5,705,940
	Asuransi	5,000	5,000		3,700	7,410	22,560	12,774	56,190	23,046	100,080	33,792	39,327	49,290	60,360
(35 MILE)	Jumlah	45,100	31,000	67,200	115,900	232,000	724,400	674,500	1,018,700	945,400	1,784,500	1,678,100	2,024,500	3,097,200	5,766,300
	Biaya Pokok	83,400	54,240	1/	255,498	510,997	1,368,741	1,277,492	2,281,235	2,189,986	4,014,974	3,969,349	4,562,470	7,560,927	13,336,790
_	Asuransi	2,000	2,000		3,700	7,410	23,190	13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110
(157 MILE)	Jumlah	88,400	59,200		259,100	518,400	1,391,900	1,291,200	2,338,300	2,215,200	4,115,600	4,006,200	4,605,600	7,615,400	13,403,900
	Biaya Pokok	101,640	96,000	177,703	310,980	621,960	1,743,710	1,721,497	2,665,544	2,554,479	4,664,701	4,553,637	5,497,684	8,440,888	14,915,090
MELONGUANE (212)	Asuransi	106,000	71,000	- 2	314.600	629,400	1.766.800	1.735.200	2.722.600	2.579.600	4.765.400	4.590.500	5.540.800	8.495,300	14.982.200
9	Biava Pokok	77,520	50.400		238.185	476.370		1.165.405	21,026,651	2,058,598	3,700,373	3.572.774	4,253,303	7,025,661	11,114,490
	Asuransi	5,000	5,000		3,700	7,410		13,710	57,135	25,215	100,710	36,870	43,170	54,510	67,110
	Jumlah	82,500	55,400	139,100	241,800	483,800	1,299,100	1,179,100	2,183,700	2,083,800	3,801,000	3,609,600	4,296,400	7,080,100	11,181,600
ய்	Biaya Pokok	96,000	62,400	16	293,784	2	-	1,6	2,518,147	2,413,224	4,406,757	4,301,835	5,193,678	7,974,132	14,704,090
COO MILEY	Asuransi	5,000	2,000	3,090	3,700	7.410	1 701 900	1 619 000	2575 200	23,213	4 507 400	338 700	5 236 800	8 028 600	14 771 200
Ė	Biava Pokok	72.820	47,300		195,998	391,995	-	1.077.986	1.679.979	1,609,979	2,939,963	2,869,963	3,429,956	5.319.932	11.086.100
	Asuransi	5,000	5,000		3,700	7,410		13,710	57,135	25,215		36,870	43,170	54,510	67,110
	Jumlah	77,800	52,300	115,000	199,600	399,400	1,248,100	1,091,600	1,737,100	2,635,100	3,040,600	2,906,800	3,473,100	5,374,400	11,153,200
SIALI TABILINA	Biaya Pokok	52,680	34,200	0,	161,177	322,354	1,007,356	949,793	1,381,517	1,323,954	2,417,655	2,360,092	2,849,379	4,374,804	8,862,405
	Asuransi	2,000	5,000		3,700	7,410		13,395	56,820	24,900	100,395	36,555	42,855	54,195	66,795
(03 mile)	Jumlah	22,600	39,200		164,800	329,800	1,030,200	963,100	1,438,300	1,348,800	2,518,000	2,396,600	2,892,200	4,428,900	8,929,200
BITUNG-SIAU	Biaya Pokok	63,000	40,920	÷	16	386,362	1,207,382	1,055,597	1,615,133	1,586,846	2,897,718	2,8	3,415,168	5,243,490	9,824,905
	Asuransi	2,000	5,000	3,090	3,700	393 800	1 230 200	13,395	56,820	1611,700	100,395	36,555	3 458,000	5 297 600	9.891,700
\top	Dokok	44 880	29 180		137 782	275 563	861 136	811 028	1 180 986	1 131 778	2 066 726		1	3 739 790	8 084 805
ARO	Aguranei	000	5,100					12,205		24 900	100,305				86 795
(43 MILE)	Asuralisi Jumlah	49,800	34,100		14	283,000		825,300	1,2	1,156,600	2,167,100	2,0	2,478,600	3,7	6,131,400

DR. S. H. SARUNDAJANG

GUBERNUR SULAMESI UTARA